

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi Pelaksanaan Fungsi Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, transparansi anggaran dapat dilihat dari beberapa indikator, Aksesibilitas Informasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah berusaha untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan proses penganggaran. Namun, masih terdapat kendala dalam hal aksesibilitas data dan informasi yang memadai. Masyarakat sering kali kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan anggaran secara rinci; Proses musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran juga menjadi indikator transparansi. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan setiap tahun memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Namun, partisipasi masyarakat dalam forum ini masih perlu ditingkatkan agar lebih representatif; DPRD juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada masyarakat. Laporan ini harus mencakup penggunaan anggaran, pencapaian program, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Meskipun laporan tersebut disampaikan,

kualitas dan kejelasan informasi yang disajikan masih perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Konsep Ideal dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam melaksanakan fungsi anggarannya, DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, banyak anggota DPRD yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan secara efektif; Akses terhadap data yang akurat dan relevan sering kali terbatas, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran. Tanpa data yang memadai, DPRD sulit untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap rencana anggaran; Kepentingan politik sering kali mempengaruhi keputusan terkait alokasi anggaran. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya; Ketidakselarasan antara fraksi-fraksi di DPRD dapat menghambat proses pembahasan dan persetujuan anggaran. Komunikasi yang tidak efektif dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten dalam pengawasan anggaran. Serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa konsep ideal perlu diterapkan; Pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPRD sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan

daerah. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti analisis anggaran, manajemen keuangan daerah, serta teknik-teknik pengawasan; Menerapkan sistem transparansi dalam penyampaian informasi anggaran kepada publik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas DPRD. Laporan berkala mengenai penggunaan anggaran harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan; Mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja dapat membantu mengaitkan alokasi dana dengan hasil yang diharapkan. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar dapat dinilai efektivitasnya; Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui forum musyawarah atau konsultasi publik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat; Membuat Standard Operating Procedures (SOP) terkait pengawasan anggaran akan memberikan kejelasan tentang proses dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis pada akhir penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Diharapkan transparansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Sebagai hasilnya, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran akan semakin meningkat, sehingga tujuan pembangunan daerah

dapat tercapai dengan lebih baik dan berkelanjutan.

2. Penulis mengharapkan dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diminimalisir, sementara konsep ideal dalam pengelolaan anggaran dapat terwujud dengan baik. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas penggunaan APBD serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

